



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR-RI
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	25 (Duapuluh lima)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional
Hari/Tanggal	:	Senin, 5 Maret 2007
Pukul	:	10.15 – 12.45 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Heri Akhmadi/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai Realokasi Tunjangan Profesi Guru Tahun 2007 2. Rekrutmen dan Distribusi Calon Tenaga Guru SD dan SMP 3. Lain-lain
Hadir	:	34 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR-RI
Hadir Pemerintah	:	Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional beserta jajarannya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pukul 10.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Heri Akhmadi, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional memberikan penjelasan dan dilanjutkan dengan pertanyaan, tanggapan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR-RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/ kesepakatan sebagai berikut :

Realokasi Anggaran Tunjangan Profesi Guru

1. Program yang diusulkan Dirjen PMPTK Depdiknas tentang realokasi anggaran tunjangan profesi guru, yang dapat disetujui dengan catatan adalah; (i) tunjangan daerah khusus, namun sasarannya adalah daerah yang sudah ditetapkan oleh Kemeneg Pembangunan Daerah Tertinggal; (ii) program tunjangan KJM untuk guru SD di daerah khusus, namun istilahnya diseragamkan menjadi "daerah khusus"; (iii) program magang bagi widyaiswara LPMP dan P4TK masing-masing 1 orang, sehingga total 42 orang, dengan ketentuan ada batasan umur widya iswara yang dikirim maksimal 35 tahun dan dilakukan sebaran

- negara tujuan belajar; (iv) program bantuan insentif bagi pendidik PAUD dan program pelatihan pendidik PAUD di 441 kab/kota, namun, pengembangan PAUD agar tidak mengganggu program wajar dikdas; (v) program peningkatan mutu tenaga kependidikan SBI, dengan catatan dikoordinasikan dengan Ditjen MPDM dalam penentuan SBI; (vi) program *blockgrant* penelitian kelas bagi guru disetujui dengan penambahan sasaran, namun tidak melalui LPMP.
2. Program yang ditolak dan harus dihapus adalah; (i) penambahan unit cost sertifikasi tahun 2007 dengan anggaran Rp. 70 miliar (ii) program untuk Tim Pemantau Independen (TPI) UN pada BSNP sebesar Rp. 15 miliar; (iii) Program dan kebutuhan departemen melalui biro keuangan setjen sebesar Rp. 20 miliar.
 3. Program yang dipending dan dibahas lebih lanjut adalah; (i) program pelatihan dan seleksi asesor serta pembekalan asesor; (ii) keseluruhan program sertifikasi (akan dibahas dengan dirjen dikti); (iii) program *blockgrant* bagi organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan; (iv) distribusi program peningkatan mutu tenaga kependidikan SBI, untuk dikoordinasikan dengan Dirjen MPDM.
 4. Disepakati adanya penambahan program, yaitu : (i) program pelatihan tutor Paket A dan B pada PTK-PNF; (ii) program tunjangan bagi guru swasta dengan fokus jenjang pendidikan dasar, untuk menunjang program wajar dikdas.
 5. Perlu ada penjelasan mengenai **keterkaitan** antara pelatihan dan kursus pendidik dengan program sertifikasi, dan dijelaskan dalam rapat dengan dirjen dikti.
 6. Komisi X DPR-RI meminta Dirjen PMPTK merumuskan kembali program-program yang telah disepakati sekaligus penganggarannya dan mengajukan kembali ke Komisi X untuk dibahas pada RDP besok malam, Selasa (6/3) pukul 19.30.

Penyelesaian masalah Guru dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas

1. Dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru adalah pada aspek sebaran guru yang tidak merata (antara kota – desa) dan banyaknya guru yang mempunyai latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajar (*mismatch*).
2. Untuk guru SD, jumlah yang ada sekarang sebanyak 1,25 juta orang dengan jumlah sekolah SD sebanyak 135.364 sekolah dan 866.835 rombongan belajar. sementara jumlah ideal yang dibutuhkan secara nasional sebesar 1,146 juta. Dengan demikian, ada kelebihan sebanyak 97.615 orang guru SD.
3. Akibat sebaran guru yang tidak merata, daerah yang masih membutuhkan guru SD antara lain Kalimantan Barat (3080 orang), Sulawesi Utara (1.168 orang), NTT (1.628 orang), Maluku Utara (2.339) , Gorontalo (129) , Irijaab (437), dan Sulbar (389) orang.
4. Sementara, jumlah guru SMP saat ini sebanyak 485.673, sementara kebutuhan guru SMP secara nasional sebanyak 253.109 orang. Dengan demikian, terjadi surplus sebanyak 232.564 guru SMP.
5. Adanya surplus guru tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah rombongan belajar (rombel) sebesar 174.632 rombel.

III. Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB

Jakarta, 5 Maret 2007
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,
ttd

HERI AKHMADI